



IKM
3,99 / 99,77 %



LAPORAN
MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
TRIWULAN I TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap Layanan.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik yang berorientasi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah dengan melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan Pengadilan. Laporan ini memuat hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi mengenai pelayanan yang diberikan pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada masyarakat pengguna pengadilan.

IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Variabel Anti Korupsi Antara lain meliputi : Integritas, Kecurangan, Pungli, Diskriminasi, Gratifikasi, dan Pencaloan.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Tinggi Telah mendapat Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 10 Desember 2019 dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tanggal 21 Desember 2020, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan: pengarah/pengendali (driver), system dan penggerak (system and enabler), dan hasil (result).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian Lanjutan mempertahankan Zona Integritas Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Adapun sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sesuai yang diharapkan pengguna layanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- h) SK KMA Nomor 1230/DJU/SK/HM02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi LENTERA, SISUPER, PERKUSI.
- i) SK KMA Nomor 1365/DJU/SK/HM02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei (Sisuper) pada Direktur Badan Peradilan Umum dan Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya

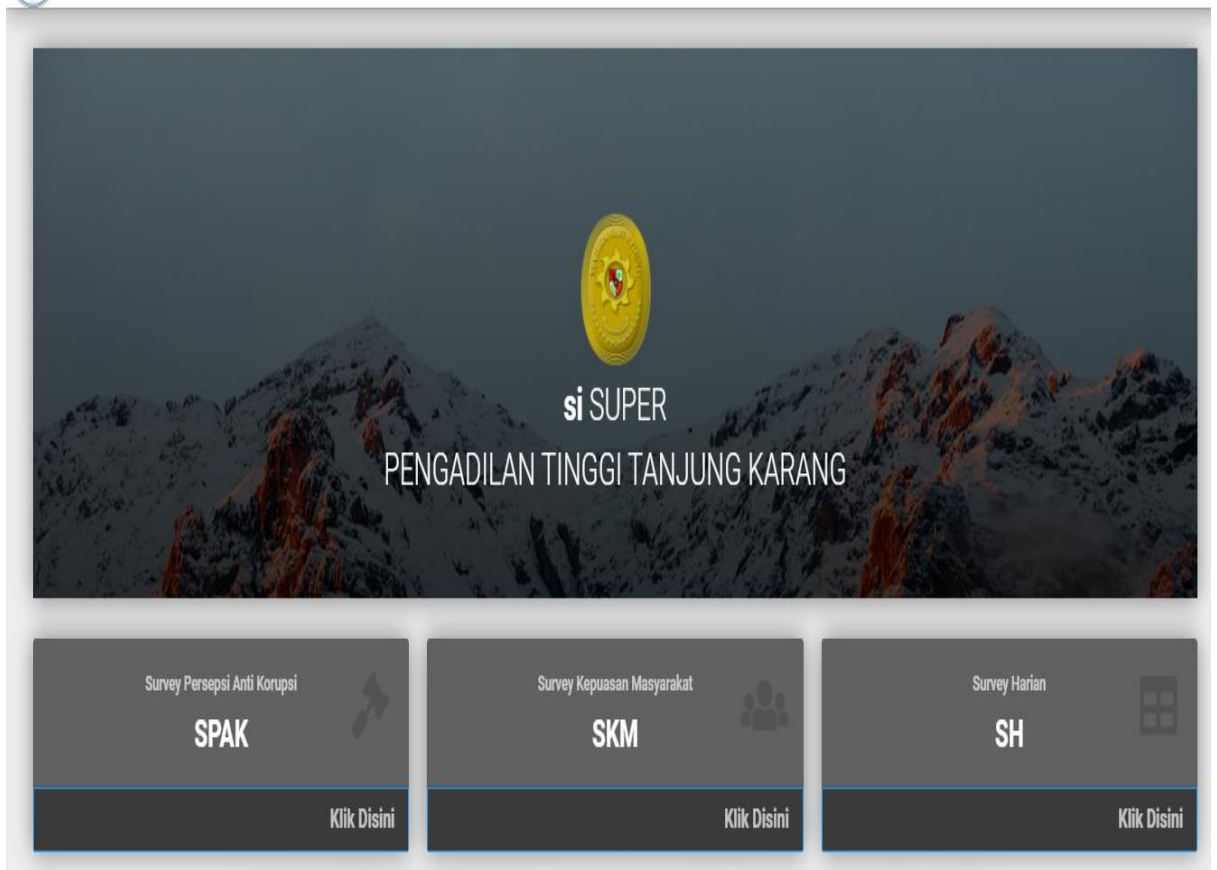
C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan Skala Likert teknik analisis menggunakan Analisa Univariat / Analisa Bivariat Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Adapun survey kepuasan pengguna layanan dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Mengisi Link survei Kuisisioner Aplikasi Sisuper yang diletakkan pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan SK KMA Nomor 1230/DJU/SK/HM02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi LENTERA, SISUPER, PERKUSI.;
- Mengisi Link survei pada beranda Website Pengadilan Tinggi Tanjungkarang formulir kuesioner online pada pencari keadilan;
- Data yang diperoleh dievaluasi dengan menggunakan rumus perhitungan metode teknik Analisa Univariat / Analisa Bivariat.
- Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan di masing-masing unit layanan.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat yang telah menerima layanan pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang seperti mahasiswa, advocat, Pegawai Negeri Sipil, Swasta, dll.



D. Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.

Jumlah pengguna responden yang telah menerima layanan dan mengisi Link Survei mencapai 76 (tujuh (*tujuh puluh enam*) responden pengguna layanan dalam Periode I (Januari - Maret) Tahun 2022. Hasil pengumpulan survey kepuasan yaitu :

Tabel 1.
Hasil Pengumpulan Data
Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata skor	Kategori	Ranking
BERDASARKAN PERMENPAN NOMOR 14 TAHUN 2017				
1.	Manipulasi Peraturan	4.00	Sangat Baik	I
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	Sangat Baik	VIII
3.	Menjual Pengaruh	3.92	Sangat Baik	X
4.	Transparansi Biaya	4.00	Sangat Baik	III
5.	Biaya Tambahan	4.00	Sangat Baik	V
6.	Hadiah	4.00	Sangat Baik	II
7.	Transparansi Pembayaran	4.00	Sangat Baik	VII
8.	Percaloan	3.98	Sangat Baik	IX
9.	Perbuatan Curang	4.00	Sangat Baik	IV
10	Transaksi Rahasia	4.00	Sangat Baik	VI

Berdasarkan pada Tabel di atas, pengisian 9 pertanyaan diklasifikasikan 3 kategori yaitu:

- Berwarna Hijau (I, II, III)
- Berwarna Kuning (IV, V, VI, VII)
- Berwarna Merah (VIII, IX, X)

Hasil Kuesioner Periode I Tahun 2022 telah diisi dihitung dan dievaluasi pada akhir Maret Tahun 2022. Pengukuran Survei Persepsi anti Korupsi mengikuti prosedur dengan menggunakan rumus perhitungan metode teknik Analisa Univariat / Analisa Bivariat. Hasil perhitungan tercantum dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2.
Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor		SKM Pengguna Pelayanan
		Skala 100	Skala 1-4	
1.	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,54 – 4,00	3.99 / 99.77% dengan skala Sangat Baik
2.	B (Baik)	76,61 – 88,30	3,07 – 3,53	
3.	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,06	
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,59	

Tabel 3.
Perbandingan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor IKM					
		Triwulan IV Tahun 2021	Rankng	Ket	Triwulan I Tahun 2022	Rankng	Ket
1	Manipulasi Peraturan	3.79	X	S B	4.00	I	S B
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.87	VIII	S B	4.00	VIII	S B
3	Menjual Pengaruh	3.85	IX	S B	3.92	X	S B
4	Transparansi Biaya	3.98	V	S B	4.00	III	S B
5	Biaya Tambahan	3.92	VII	S B	4.00	V	S B
6	Hadiah	3.99	II	S B	4.00	II	S B
7	Transparansi Pembayaran	3.95	VI	S B	4.00	VII	S B
8	Percaloan	3.99	III	S B	3.98	IX	S B
9	Perbuatan Curang	3.98	IV	SB	4.00	IV	S B
10	Transaksi Rahasia	3.99	I	SB	4.00	VI	SB

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi



Indeks Total

Data Umum Responden

Data Domisili Responden

Data Umur Responden

Data Layanan

Nilai Per Unsur

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	304	304	298	304	304	304	304	303	304	304	
NRR Per RL	4,000	4,000	3,921	4,000	4,000	4,000	4,000	3,987	4,000	4,000	39,908
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,392	0,400	0,400	0,400	0,400	0,399	0,400	0,400	3,991
IPAK Unit Pelayanan											3,99

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	298
2	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	303
3	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	304

E. Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Tahun 2022 terdapat 3 Nilai Terendah dari 10 Unsur yang ditetapkan sebagai pertanyaan pada Kuisisioner yang telah di isi oleh pengguna layanan/responden yang telah menerima layanan pada Pengadilan Tinggi tanjungkarang.

- ❖ Adapun 3 hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan **3 (tiga) Nilai Terendah dan Tindak lanjutnya** sebagai berikut :

1. Menjual Pengaruh (298/ 3,58)

Tindak Lanjut:

- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu warning untuk tidak menawarkan bantuan dalam pengurusan surat ataupun perkara dengan imbalan;
- Pimpinan Selalu melakukan Pembinaan terhadap ASN Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

2. Percaloan (303/ 3,92)

Tindak Lanjut:

- Setiap Rapat Bulanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selalu warning untuk tidak menawarkan bantuan dalam pengurusan surat ataupun perkara dengan imbalan;
- Pimpinan Selalu melakukan Pembinaan terhadap ASN Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

3. Manipulasi Peraturan (304/ 4.00)

Tindak Lanjut:

- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah menerapkan Prosedur yang berlaku sesuai dengan SK KPT Nmor W9.U/263/OT.01.3/12/2021 tentang SOP pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
- Setiap seminggu sekali Kasubag dan Panitera Muda Pembinaan terhadap Front Office/Petugas PTSP.

F. Saran dan Rekomendasi

✓ **Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi dan Tindak Lanjut Survey Persepsi Anti korupsi, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan terutama 3 nilai terendah yaitu Menjual pengaruh, Percewaan, Manipulasi Peraturan. Saran dan Masukan untuk ditinjau kembali dan dilaksanakan untuk Kepuasan, kenyamanan, kemudahan pengguna layanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

- Meningkatkan Impelentasi Standar Pelayanan Peradilan Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan cara meningkatkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan publik.
- Meningkatkan Impelementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu namun terus diupayakan, dan menjamin agar lingkungan kerja terkendali sehingga dapat dipastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan. Hal yang paling mendasar adalah peningkatan kesadaran dan pemahaman hakim dan pegawai tentang sistem manajemen mutu.
- Memberikan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Meningkatkan Kapabilitas Petugas Layanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah mengimplementasikan pemanfaatan aplikasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

✓ **Rekomendasi**

Adapun rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan responden, sebagai berikut

	Nama/Kode Responden	Kesan & Pesan	Waktu Rekam
21	RINALDI AKRABI R-400364-IPAK-9EECCD1D51 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	TERIMAKASIH ATAS PELAYANANNYA YANG SANGAT BAIK SEMOGA KEDEPANNYA BISA MENJADI MAJU LAGI	Selasa, 17 Mei 2022 10:22:00 WIB
22	ADZAN ZAHTI R-400364-IPAK-D138845863 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	TERIMAKASIH ATAS PELAYANANNYA SEMOGA KEDEPANNYA BISA LEBIH BAIK LAGI	Selasa, 17 Mei 2022 10:18:20 WIB
23	RIEZKI PERSADA R-400364-IPAK-BA489E42F1 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	TERIMAKASIH ATAS PELAYANAN SEMOGA LEBIH DITINGKATKAN	Selasa, 17 Mei 2022 10:06:34 WIB
24	Nayra R-400364-IPAK-0E83558E9E PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang baik	Jumat, 18 Maret 2022 11:01:13 WIB
25	Jihansyah R-400364-IPAK-AB7F51093F PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang baik	Jumat, 18 Maret 2022 10:57:24 WIB
26	Arzangga R-400364-IPAK-85071081F2 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang baik	Jumat, 18 Maret 2022 10:51:46 WIB

	Nama/Kode Responden	Kesan & Pesan	Waktu Rekam
61	Reza R-400364-IPAK-E867BD77F3 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bagus	Rabu, 16 Maret 2022 10:11:21 WIB
62	Bagus R-400364-IPAK-F390D3C1CC PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bagus	Rabu, 16 Maret 2022 09:35:38 WIB
63	Arip R-400364-IPAK-55B419AE01 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Pelayanan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bagus	Rabu, 16 Maret 2022 09:24:30 WIB
64	Hani R-400364-IPAK-48EB810008 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	terimakasih atas pelayan nya	Jumat, 28 Januari 2022 11:09:31 WIB
65	Muhammad Arif R-400364-IPAK-5F51474241 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	terimakasih pelayan nya pengadilan tinggi tanjungkarang	Jumat, 28 Januari 2022 11:05:14 WIB
66	Susanto R-400364-IPAK-67C5540CFA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	terimakasih atas pelayan nya	Jumat, 28 Januari 2022 11:01:49 WIB

	Nama/Kode Responden	Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
+ 21	RINALDI AKRABI R-400364-IPAK- 9EECCD1D51 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
+ 22	ADZAN ZAHTI R-400364-IPAK- D138845863 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
+ 23	RIEZKI PERSADA R-400364-IPAK- BA489E42F1 PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Layanan Hukum / Informasi	4	4	2	4	4	1	4	4	4	4
+ 24	Nayra R-400364-IPAK- 0E83558E9E PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
+ 25	Jihansyah R-400364-IPAK- AB7F51093F PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Mengetahui

Ketua

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum.
NIP. 19760305 198303 1003



Ketua Tim Survey

Annastacia Tyas E.E.N, S.H.
NIP. 19610227 198612 2 001

